

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN MAROS

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN APBD

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi tau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagai terinci Tabel 1

TABEL 1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.

TABEL 2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Makassar	Jakarta	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
2.	Makassar	Ambon	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
3.	Makassar	Balikpapan	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
4.	Makassar	Banda Aceh	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
5.	Makassar	Bandar Lampung	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
6.	Makassar	Batam	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
7.	Makassar	Denpasar	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
8.	Makassar	Jambi	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
9.	Makassar	Yogyakarta	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
10.	Makassar	Kupang	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
11.	Makassar	Malang	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
12.	Makassar	Mataram	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
13.	Makassar	Medan	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
14.	Makassar	Padang	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
15.	Makassar	Palembang	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
16.	Makassar	Palu	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
17.	Makassar	Pangkal Pinang	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
18.	Makassar	Biak	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
19.	Makassar	Jayapura	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
20.	Makassar	Kendari	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
21.	Makassar	Manado	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
22.	Makassar	Timika	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	Makassar	Pontianak	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
24.	Makassar	Semarang	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
25.	Makassar	Solo	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
26.	Makassar	Surabaya	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 12, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost (riil) atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah*.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan,

terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.

TABEL 3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	Riau	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	Jambi	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	Lampung	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	Bengkulu	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	Banten	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	Bali	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp265.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	Maluku	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	Papua	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	Papua Barat	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	Rp513.000,00

1. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 13, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost(riil)*.

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost/ril*.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*one way* terinci pada Tabel 4.

TABEL 4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab . Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Taniung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab . Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGGULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tega!	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Maros	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Maros	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Maros	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Maros	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Maros	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Maros	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Maros	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Maros	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Maros	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Maros	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Maros	Kota Makassar	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Maros	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Maros	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Maros	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Maros	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Maros	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Maros	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Maros	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Maros	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Maros	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
334.	Maros	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*).

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost/riil*. Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/ Kota sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 5.

TABEL 5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I atau setara yang pesertanya menteri, eselon I atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 6.

TABEL 6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2.	Rapat Biasa			
	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp25.000,00	Rp15.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 7.

TABEL 7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sulawesi Selatan	m ² /tahun	Rp209.000,00	Rp190.000,00	Rp10.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10, dan Tabel 11.

TABEL 8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
3.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp42.350.000,00
4.	Pejabat Eselon II		
	Sulawesi Selatan	Unit/Tahun	Rp42.130.000,00

TABEL 9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sulawesi Selatan	Unit/Tahun	Rp36.770.000,00	Rp39.360.000,00	Rp4.910.000,00

TABEL 10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 dan *SPEED BOAT*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
3.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

TABEL 11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon 1	Unit/Tahun	Rp11.100.000,00
2.	Pejabat Eselon 11	Unit/Tahun	Rp10.990.000,00
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000,00
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal*

computer/notebook, printer, AC Split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 11.

TABEL 11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	<i>Genset</i> 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	<i>Genset</i> 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	<i>Genset</i> 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	<i>Genset</i> 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	<i>Genset</i> 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	<i>Genset</i> 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	<i>Genset</i> 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

1. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan :

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
- c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil terinci pada Tabel 12.

TABEL 12

BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	Per hari	Rp930.000,00	Rp3.282.000,00	Rp4.638.000,00
2.	Sumatra Utara	Per hari	Rp1.220.000,00	Rp2.890.000,00	Rp3.475.000,00
3.	Riau	Per hari	Rp978.000,00	Rp3.155.000,00	Rp4.585.000,00
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp979.000,00	Rp2.373.000,00	Rp3.910.000,00
5.	Jambi	Per hari	Rp1.005.000,00	Rp5.585.000,00	Rp7.190.000,00
6.	Sumatera Barat	Per hari	Rp922.000,00	Rp2.124.000,00	Rp3.500.000,00
7.	Sumatera Selatan	Per hari	Rp1.507.000,00	Rp2.200.000,00	Rp4.097.000,00
8.	Lampung	Per hari	Rp846.000,00	Rp3.594.000,00	Rp5.052.000,00
9.	Bengkulu	Per hari	Rp985.000,00	Rp4.763.000,00	Rp6.449.000,00
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp1.258.000,00	Rp3.477.000,00	Rp5.342.000,00
11.	Banten	Per hari	Rp972.000,00	Rp2.801.000,00	Rp4.120.000,00
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp932.000,00	Rp2.563.000,00	Rp3.519.000,00
13.	DKI Jakarta	Per hari	Rp1.139.000,00	Rp2.459.000,00	Rp3.439.000,00
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp1.270.000,00	Rp2.675.000,00	Rp4.237.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	Rp905.000,00	Rp2.247.000,00	Rp3.565.000,00
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp1.171.000,00	Rp2.446.000,00	Rp3.303.000,00
17.	Bali	Per hari	Rp1.157.000,00	Rp3.174.000,00	Rp3.911.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp1.103.000,00	Rp2.532.000,00	Rp3.369.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp857.000,00	Rp3.059.000,00	Rp3.468.000,00
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp868.000,00	Rp3.471.000,00	Rp4.573.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp1.177.000,00	Rp4.645.000,00	Rp6.706.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	Rp837.000,00	Rp2.630.000,00	Rp3.550.000,00
23.	Kalimantan Timur	Per hari	Rp1.100.000,00	Rp3.112.000,00	Rp4.829.000,00
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp1.100.000,00	Rp2.713.000,00	Rp4.829.000,00
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp1.195.000,00	Rp2.498.000,00	Rp3.845.000,00
26.	Gorontalo	Per hari	Rp792.000,00	Rp2.504.000,00	Rp4.038.000,00
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp880.000,00	Rp3.080.000,00	Rp3.282.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp938.000,00	Rp3.385.000,00	Rp4.293.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Sulawesi Tengan	Per hari	Rp824.000,00	Rp2.423.000,00	Rp4.212.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp945.000,00	Rp2.609.000,00	Rp5.150.000,00
31.	Maluku	Per hari	Rp1.149.000,00	Rp3.590.000,00	Rp4.021.000,00
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp1.061.000,00	Rp3.013.000,00	Rp4.170.000,00
33.	Papua	Per hari	Rp1.114.000,00	Rp4.082.000,00	Rp5.248.000,00
34.	Papua Barat	Per hari	Rp1.171.000,00	Rp3.499.000,00	Rp4.547.000,00
35.	Papua Barat Daya	Per hari	Rp1.171.000,00	Rp3.499.000,00	Rp4.547.000,00
36.	Papua Tengah	Per hari	Rp1.114.000,00	Rp4.082.000,00	Rp5.248.000,00
37.	Papua Selatan	Per hari	Rp1.638.000,00	Rp6.001.000,00	Rp7.715.000,00
38.	Papua Pegunungan	Per hari	Rp1.649.000,00	Rp6.041.000,00	Rp7.767.000,00

2. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT/OPERASIONAL KANTOR dan/atau LAPANGAN

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi

bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa.

Satuan Biaya Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan terinci pada Tabel 13 dan Tabel 14.

TABEL 13
BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Pejabat Negara/ Daerah Sulawesi Selatan	Per Bulan	Rp 50.000.000,00
(2)	Pejabat Eselon II/ Pejabat yang Setara Sulawesi Selatan	Per Bulan	Rp 13.580.000.00
(3)	Pejabat Eselon III/Pejabat yang Setara Sulawesi Selatan	Per Bulan	Rp 13.580.000,00

TABEL 14
BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR dan/atau LAPANGAN

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	MOTOR (Roda 2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sulawesi Selatan	Per Bulan	Rp6.150.000,00	Rp5.890.000,00	Rp15.080.000,00	Rp 3.000.000,00

6. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

A. SATUAN BIAYA KONSUMSI

1. Biaya Makanan dan Minuman Harian

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Makanan dan minuman harian	OH	10.000	ADD

Penjelasan:

Biaya makanan dan minuman harian dianggarkan untuk menunjang operasional harian perkantoran Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Kasi/Kaur, dan Operator lingkup pemerintah Desa.

2. Biaya Makanan dan Minuman Jamuan dan Rapat

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Makan Minum	OK	25.000	ADD/DD
2.	Kudapan (Snack)	OK	15.000	ADD/DD

Penjelasan:

Biaya jamuan makanan dan minuman dianggarkan untuk menunjang kebutuhan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka pelaksanaan rapat rutin/koordinasi, jamuan tamu, dan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*.

B. SATUAN BIAYA PAKAIAN

1. Pakaian Dinas dan Atribut

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Pakaian Dinas Upacara Besar (PDU)	Stel	2.500.000	ADD
b.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki	Stel	600.000	ADD
c.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih	Pcs	200.000	ADD

d.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Kemeja	Pcs	200.000	ADD
e.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	600.000	ADD
f.	Atribut PDU	Set	150.000	ADD
g.	Atribut PDH Keki	Set	100.000	ADD
h.	Atribut PDL	Set	100.000	ADD

Penjelasan

Satuan biaya pakaian dinas dan atribut digunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan staf pendukung operasional kantor.

2. Pakaian Khusus Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Pakaian Olahraga	Stel	200.000	ADD/DD
b.	Sewa Pakaian Adat	Stel	150.000	ADD/DD
c.	Rompi	Pcs	150.000	ADD/DD

Penjelasan:

Satuan biaya pakaian khusus lainnya hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan Desa.

C. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN

1. Biaya Operasional Rutin Perkantoran

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Listrik	Bulan	<i>at cost</i>	ADD
2.	Air	Bulan	<i>at cost</i>	ADD
3.	Internet	Bulan	<i>at cost</i>	ADD/DD
4.	Telepon	Bulan	100.000	ADD

5.	Langganan koran/majalah	Bulan	200.000	ADD
6.	Alat Tulis Kantor (ATK) dan Benda Pos	Bulan	625.000	ADD
7.	Alat-alat Rumah Tangga/ Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	Bulan	125.000	ADD
8.	Karangan Bunga	Paket	500.000	ADD
9.	Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas operasional			
	a) Kendaraan roda dua	Bulan	200.000	ADD
	b) Kendaraan roda empat	Bulan	600.000	ADD

2. Biaya Cetak dan Penggandaan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Spanduk/Baligho/ <i>Banner</i>	Meter	50.000	ADD/DD
2.	Penggandaan	Lembar	500	ADD/DD
3.	Penjilidan	buah	15.000	ADD/DD
4.	Cetak Foto	Lembar	3.500	ADD/DD
5.	Cetak Piagam/Sertifikat	Lembar	10.000	ADD/DD

3. Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Kendaraan Dinas			
	a. Pemeliharaan Ringan Kendaraan Roda 2	Unit/ Bulan	100.000	ADD
	b. Pemeliharaan Berat Kendaraan Roda 2	Unit	<i>at cost</i>	ADD
	c. Pemeliharaan Ringan Kendaraan Roda 4	Unit/ Bulan	300.000	ADD

	d. Pemeliharaan Berat Kendaraan Roda 4	Unit	<i>at cost</i>	ADD
	e. Perpanjangan STNK	Unit	<i>at cost</i>	ADD
2.	Gedung Kantor			
	a. tidak bertingkat	m ² /tahun	190.000	ADD
	b. bertingkat	m ² /tahun	209.000	ADD
3.	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tahun	5.000.000	ADD

Penjelasan:

- a) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk perawatan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;
- b) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor terdiri dari:
 - 1) Pemeliharaan ringan/rutin/berkala yaitu pemeliharaan kendaraan operasional yang skala dan/atau sifatnya ringan/rutin/berkala, misalnya : penggantian oli, spareparts kecil dan lain-lain.
 - 2) Pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan kendaraan operasional yang dan atau sifatnya besar, misalnya: turun mesin, ganti aki, pengecatan mobil, pemeliharaan akibat kecelakaan berat dalam kedinasan dan lain-lain sesuai dengan pengeluaran (*at cost*).
- c) Biaya pemeliharaan gedung kantor digunakan untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung yang memiliki spesifikasi khusus;
- d) Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor termasuk pemeliharaan peralatan elektronik dan meubeleu kantor.

D. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Uang Harian Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1) Dalam Kecamatan	OH	50.000	ADD
	2) Dalam Kabupaten Wilayah I:			
	a) Desa Bonto Manai b) Desa Bonto Manurung c) Desa Bonto Somba d) Desa Bonto Matinggi e) Seluruh desa	OH	170.000	ADD

	<p>se-Kecamatan Camba</p> <p>f) Seluruh desa se- Kecamatan Cenrana</p> <p>g) Seluruh desa se-Kecamatan Mallawa</p>			
	<p>3) Dalam Kabupaten Wilayah II:</p> <p>a) Desa Pattontongan b) Desa Baruga c) Desa Tukamasea d) Desa Bonto Bahari e) Desa Tupabbiring f) Desa Ampekale g) Desa Pajukukang h) Desa Botolempangan i) Desa Minasa Upa j) Desa Toddopulia k) Desa Lekopancing l) Desa Kurusumange m) Desa Sudirman n) Desa Purnakarya o) Desa Pabbentengang p) Desa Nisombalia q) Desa Simbang r) Desa Jenetaesa s) Desa Samangki t) Desa Sambueja u) Desa Toddolimae v) Desa Pucak w) Desa Benteng Gajah x) Desa Tompobulu y) Seluruh desa se-Kec. Moncongloe</p>	OH	150.000	ADD
	<p>4) Dalam Kabupaten Wilayah III:</p> <p>a) Desa Tenrigangkae b) Desa Bonto Matene Mandai</p> <p>c) Desa Baji Mangngai d) Desa Alatengae e) Desa Minasa Baji f) Desa Mattoanging g) Desa Mangeloreng h) Desa Salenrang i) Desa Tunikamaseang j) Desa Allaere k) Desa Damai l) Desa Marumpa m) Desa Tellumpoccoe</p>	OH	120.000	ADD

	<p>n) Desa Bonto Matene Marusu</p> <p>o) Desa Abbulosibatang</p> <p>p) Desa Temmapaduae</p> <p>q) Desa Bontotallasa</p> <p>r) Desa Tanete</p> <p>s) Seluruh desa se-Kec. Maros Baru</p> <p>t) Seluruh desa se-Kec. Lau</p>			
b.	Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Maros Khusus Diklat	OH	130.000	ADD
c.	Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Maros Dalam Provinsi Sulawesi Selatan	OH	430.000	ADD
d.	Perjalanan Dinas di luar Provinsi Sulawesi Selatan			
	1) Aceh, Kalimantan Tengah	OH	360.000	ADD
	2) Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah	OH	370.000	ADD
	3) Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku	OH	380.000	ADD
	4) Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat	OH	410.000	ADD
	5) D.I.Yogyakarta	OH	420.000	ADD
	6) Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara	OH	430.000	ADD
	7) Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	ADD

	8) Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya	OH	480.000	ADD
	9) D.K. Jakarta	OH	530.000	ADD
	10) Papua, , Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan	OH	580.000	ADD

Penjelasan:

- a) Uang harian perjalanan dinas terdiri dari komponen uang saku, uang makan, dan biaya transportasi lokal;
- b) Untuk perjalanan dinas di luar Kabupaten Maros yang konsumsinya (uang makan) ditanggung oleh penyelenggara, hanya diberikan maksimal 80% dari uang harian.
- c) Untuk perjalanan dinas di luar Kabupaten Maros, biaya transportasi terpisah dari Uang Harian.
- d) Masyarakat yang mengikuti kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ RapatKerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan di dalam Desa dapat diberikan Uang Harian Dalam Kecamatan.

2. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya (one way)	Sumber Dana
1.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			
	a. Daerah Tujuan I (Makassar, Gowa, Pangkep)	Orang/Kali	170.000	ADD
	b. Daerah Tujuan II (Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai)	Orang/Kali	250.000	ADD
	c. Daerah Tujuan III (Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Selayar)	Orang/Kali	350.000	ADD
2.	Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Maros			
	a. Tiket Pesawat	Orang/Kali	<i>at cost</i> (kelas ekonomi)	ADD

	b. Tiket Kapal Laut/Kereta Api	Orang/Kali	<i>at cost</i>	ADD
	c. Transportasi darat	Orang/Kali	<i>at cost</i>	ADD

Penjelasan:

- a) Pelaksana perjalanan dinas di luar Kabupaten Maros diberikan biaya transportasi sepanjang penyelenggara kegiatan tidak menyiapkan sarana transportasi;
- b) Biaya transportasi darat untuk perjalanan dinas luar provinsi diberikan untuk membiayai perjalananan pelaksana perjalanan dinas dari bandara/stasiun/terminal ke lokasi kegiatan dan sebaliknya.

3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	650.000	ADD
4.	Perjalanan Dinas Luar Provinsi	OH	750.000	ADD

Penjelasan:

- a) Pelaksana perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya penginapan secara *at cost* tanpa melampaui standar biaya, sepanjang penyelenggara kegiatan tidak menyiapkan sarana penginapan;
- b) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas luar daerah dilakukan sekamar berdua atau lebih, biaya penginapan diberikan berdasarkan tagihan penginapan (hotel/wisma) yang dibagi secara proporsional;

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

